

BAB II

DINAMIKA KEAMANAN INDO-PASIFIK PASCA PEMBENTUKAN AUKUS

Transformasi kawasan Indo-Pasifik menjadi pusat gravitasi geopolitik global pada abad ke-21 menuntut pemetaan ulang terhadap lanskap keamanan yang melingkupinya. Wilayah ini tidak lagi sekadar jalur perdagangan maritim, melainkan telah berevolusi menjadi arena utama persaingan kekuatan besar yang diwarnai oleh kompleksitas ancaman multidimensi. Dinamika ini ditandai oleh pergeseran struktur keamanan yang signifikan, di mana efektivitas mekanisme multilateral tradisional kian tergerus oleh kebangkitan aliansi minilateral eksklusif. Pemahaman mendalam mengenai lingkungan strategis yang meliputi ancaman tradisional maupun non-tradisional ini menjadi topik utama untuk membedah anatomi kerentanan yang dihadapi oleh negara-negara di dalamnya.¹⁸

Dalam ekosistem keamanan yang labil tersebut, kemunculan aliansi trilateral AUKUS hadir sebagai gangguan yang mengubah kondisi keamanan regional secara fundamental. Kehadiran pakta pertahanan ini merepresentasikan bentuk penyeimbangan keras yang memicu eskalasi dilema keamanan serta mengubah *balance of power*. Implikasi struktural dari manuver ini merambat jauh melampaui aspek militer semata, karena secara langsung menantang integritas

¹⁸ Barry Buzan dan Ole Wæver, 2003, *Regions and Powers: The Structure of International Security*, Cambridge: Cambridge University Press.

rezim non-proliferasi nuklir global serta menguji relevansi institusi regional yang selama ini menjadi penyangga utama stabilitas di Asia Tenggara.¹⁹

2.1 Keamanan Indo-Pasifik dan Kemunculan AUKUS

Kawasan Indo-Pasifik pada abad ke-21 telah menjadi pusat geopolitik dan geoekonomi dunia. Wilayah ini tidak hanya menampung lebih dari setengah populasi global, tetapi juga menjadi jalur bagi sebagian besar perdagangan maritim internasional yang melewati titik-titik penyempitan strategis seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.²⁰ Pentingnya kawasan ini membuat setiap dinamika keamanan yang terjadi di dalamnya memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas global. Oleh karena itu, Indo-Pasifik kini menjadi panggung utama perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar yang berusaha membentuk tatanan regional sesuai dengan kepentingan nasional mereka.

Dinamika keamanan di kawasan ini didominasi oleh kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan militer dan ekonomi baru yang semakin agresif setiap tahunnya. Tiongkok secara konsisten melakukan modernisasi angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Laut, serta memperluas klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan melalui pembangunan pulau buatan dan militerisasi fitur-fitur maritim. Langkah-langkah ini dipandang oleh banyak negara sebagai upaya Beijing untuk mengubah status quo dan mendominasi jalur komunikasi laut yang vital. Akibatnya,

¹⁹ The International Institute for Strategic Studies (IISS), 2023, *Asia-Pacific Regional Security Assessment 2023: Key Developments and Trends* (ed.10), London: The International Institute for Strategic Studies.

²⁰ World Bank. *Trade and Trade Facilitation in the Indo-Pacific*, Washington, DC: World Bank, (2020).

muncul persepsi ancaman yang meluas sehingga memicu *security dilemma* di seluruh kawasan.²¹

Amerika Serikat di bawah strategi *Free and Open Indo-Pacific* berupaya mempertahankan dominasi dan tatanan berbasis aturan yang telah lama kuat sebagai respon terhadap kebangkitan Tiongkok. Washington memperkuat kehadirannya melalui peningkatan rotasi pasukan, latihan militer bersama, dan penguatan aliansi bilateral dengan mitra-mitra lamanya di Asia Pasifik.²² Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini menciptakan polarisasi yang tajam, memaksa negara-negara di kawasan untuk menyikapi tekanan diplomatik yang semakin berat. Rivalitas ini tidak hanya terjadi di ranah militer, tetapi juga meluas ke bidang teknologi, ekonomi, dan diplomasi infrastruktur.

Di tengah meningkatnya ketegangan kekuatan besar, tatanan keamanan regional yang selama ini berpusat pada ASEAN mulai menghadapi tantangan efektivitas. Prinsip *ASEAN Centrality* dan mekanisme kesepakatan Bersama yang lambat dinilai oleh beberapa pihak kurang memadai untuk merespon ancaman keamanan keras yang bergerak cepat. Ketidakmampuan forum multilateral tradisional untuk menghasilkan tindakan tegas dalam isu-isu kritis membuat negara-negara besar mencari alternatif mekanisme kerja sama keamanan yang lebih praktis dan eksklusif. Hal ini menandai pergeseran tren dari multilateralisme yang inklusif menuju minilateralisme yang berbasis pada kesamaan kepentingan strategis dan persepsi ancaman.

²¹ Center for Strategic and International Studies (CSIS), *How Much Trade Transits the South China Sea?*, diakses dalam <https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/> (25/12/2025).

²² The White House, *Indo-Pacific Strategy of the United States*, (Washington DC 2022), hal. 10.

Fenomena minilateralisme ini terlihat jelas dengan dihidupkannya kembali *Quadrilateral Security Dialogue* (QUAD) yang beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Forum-forum semacam ini dirancang untuk lebih fokus dalam membendung pengaruh Tiongkok, meskipun sering kali dibungkus dengan narasi penyediaan barang publik regional. Namun, bagi negara-negara seperti Australia, mekanisme konsultatif saja tidak cukup untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan militer yang semakin lebar dengan Tiongkok. Australia merasakan urgensi akibat memburuknya hubungan bilateral dengan Beijing dan kerentanan geografisnya sebagai negara benua yang relatif terpisah secara geografis.

Kebutuhan Australia untuk memiliki kemampuan penangkalan yang kredibel menjadi faktor pendorong utama perubahan postur pertahanannya. Armada kapal selam kelas *Collins* yang bertenaga diesel listrik dinilai memiliki keterbatasan jangkauan dan daya tahan operasional untuk memantau lingkungan maritim yang luas hingga ke utara. Dalam pertimbangan strategis Canberra, diperlukan lompatan teknologi yang memungkinkan angkatan lautnya beroperasi lebih jauh, lebih lama, dan lebih senyap untuk mengimbangi ekspansi maritim kekuatan lawan.²³ Kesadaran akan celah kapabilitas ini membuka jalan bagi negosiasi rahasia yang melibatkan sekutu tradisionalnya, yaitu Amerika Serikat dan Inggris.

Faktor geografis memainkan peran penentu dalam kerjasama pertahanan baru ini, mengingat posisi Australia yang menghadapi tantangan *tyranny of*

²³ Australian Government, Department of Defence, *2020 Defence Strategic Update*. Canberra. p. 10-12, (2020), diakses dalam <https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/2020-defence-strategic-update> (30/12/2025).

distance. Pangkalan utama Angkatan Laut Australia terpusat di wilayah selatan benua, seperti *HMAS Kuttabul* di Sydney dan *HMAS Stirling* di Perth yang berjarak ribuan kilometer dari titik panas potensial di Laut Cina Selatan dan Asia Timur. Dalam skenario konflik terbuka dengan kekuatan besar di utara, kapal selam Australia harus menempuh perjalanan panjang melintasi perairan Indonesia dan Pasifik. Jarak tempuh yang ekstrem ini menjadi kendala logistik fatal jika Australia tetap mempertahankan postur pertahanan yang lama, karena waktu yang habis di perjalanan akan mengurangi durasi efektif patroli di wilayah operasi.²⁴

Masalah jarak ini diperparah oleh keterbatasan teknis armada kapal selam kelas *Collins* yang saat ini dimiliki Australia. Sebagai kapal selam konvensional bertenaga diesel listrik, armada ini harus muncul ke permukaan atau melakukan *snorkeling* secara berkala untuk mengisi ulang baterai, sebuah manuver yang meningkatkan risiko deteksi oleh radar, satelit, dan sensor anti-kapal selam musuh yang semakin canggih.²⁵ Oleh karena itu, kebutuhan akan propulsi nuklir bukan sekadar ambisi politis, melainkan kebutuhan operasional mutlak agar angkatan laut Australia dapat menyelam dalam waktu tak terbatas, mempertahankan kerahasiaan penuh, dan memproyeksikan kekuatan secara efektif dari pangkalan di Sydney hingga ke perairan utara tanpa terdeteksi.

Puncak dari pertemuan kepentingan ketiga negara tersebut terjadi pada 15 September 2021 dengan diumumkannya pembentukan kemitraan keamanan

²⁴ Michael Shoebridge, *AUKUS nuclear submarine deal shows the world has changed*, Australian Strategic Policy Institute (ASPI), diakses dalam <https://www.aspistrategist.org.au/aukus-nuclear-submarine-deal-shows-the-world-has-changed/> (02/01/2026).

²⁵ Karen Elphick, *The Deterrence Advantage of Nuclear-Powered Submarines in a Contested Indo-Pacific*, Research Paper Series, 2024–25, Maret 2025, Parliament of Australia.

trilateral yang dikenal sebagai AUKUS. Pengumuman ini mengejutkan lingkup internasional karena sifatnya yang tiba-tiba dan implikasi strategisnya yang sangat besar. AUKUS bukan sekadar pakta pertahanan biasa, melainkan sebuah kesepakatan transfer teknologi militer tingkat tinggi yang sebelumnya sangat dibatasi oleh Amerika Serikat. Inti dari kesepakatan ini adalah komitmen AS dan Inggris untuk membantu Australia mengakuisisi armada kapal selam bertenaga nuklir, menjadikan Australia negara non-nuklir pertama yang memiliki akses terhadap teknologi propulsi sensitif tersebut.

Selain fokus pada kapal selam, kemitraan AUKUS juga mencakup kerja sama pengembangan kemampuan teknologi canggih lainnya di bawah Pilar II. Kerangka kerja sama ini meliputi bidang siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, serta kemampuan bawah laut tambahan yang bertujuan untuk memastikan keunggulan teknologi sekutu Barat di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa AUKUS dirancang sebagai aliansi teknologi-militer komprehensif untuk menghadapi kompetisi jangka panjang di Indo-Pasifik. Kehadiran pakta ini secara efektif mengintegrasikan pangkalan industri pertahanan dan rantai pasok ketiga negara dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kondisi keamanan Indo-Pasifik pasca pembentukan AUKUS menjadi jauh lebih kompleks dan tegang. Kehadiran kapal selam bertenaga nuklir di masa depan akan mengubah doktrin pertahanan dan kalkulasi risiko di perairan strategis kawasan. AUKUS menegaskan bahwa Indo-Pasifik kini telah beralih dari fase kompetisi diplomatik menjadi fase persiapan militer yang lebih serius di antara kekuatan-kekuatan besar. Bagi negara-negara insulator seperti Indonesia, realitas

baru ini menuntut penyesuaian kebijakan yang cermat untuk menjaga kedaulatan di tengah kacaunya geopolitik yang semakin tidak terprediksi.

2.1.1. Ancaman Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik pada abad ke-21 telah berubah menjadi pusat geopolitik global, namun sekaligus berevolusi menjadi salah satu lingkungan keamanan paling vital di dunia. Dinamika keamanan di kawasan ini tidak lagi bersifat satu dimensi, melainkan terbentuk dari pertemuan berbagai ragam ancaman yang saling beririsan. Negara-negara di kawasan ini dihadapkan pada realitas keamanan yang kompleks, di mana stabilitas regional terus-menerus diuji oleh persaingan kekuasaan antarnegara besar serta munculnya tantangan-tantangan baru yang bersifat lintas batas. Kondisi ini menciptakan kondisi ketidakpastian yang memaksa setiap aktor negara untuk meningkatkan kewaspadaan dan meninjau ulang pertahanan mereka.

Ancaman di Indo-Pasifik sangat dipengaruhi oleh perubahan struktural dalam tatanan internasional, terutama bangkitnya rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kompetisi ini telah menciptakan tekanan menyeluruh yang memperburuk persepsi ancaman di antara negara-negara kawasan. Setiap pergerakan militer atau manuver diplomatik dari satu pihak kekuatan besar segera dimaknai sebagai upaya dominasi oleh pihak lainnya, sehingga memicu *security dilemma*. Akibatnya, ancaman konflik terbuka bukan lagi sekadar hipotesis, melainkan kemungkinan nyata yang membayangi ancaman kawasan setiap saat.²⁶

²⁶ Rory Medcalf, 2020, *Contest for the Indo-Pacific: Why China Won't Map the Future*, Melbourne: La Trobe University Press, hal. 25–30.

Kawasan ini juga rentan terhadap berbagai ancaman yang tidak bersumber dari agresi militer langsung, namun memiliki pengaruh yang setara terhadap kelangsungan hidup negara dan masyarakat. Kerentanan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga kejahatan transnasional menjadi variabel-variabel kritis yang turut membentuk peta keamanan regional. Interaksi antara ancaman militer keras dan ancaman non-militer inilah yang membuat manajemen keamanan di Indo-Pasifik menjadi sangat kompleks, menuntut pendekatan yang komprehensif dan multidimensi.²⁷

Situasi keamanan semakin diperparah oleh adanya ketimpangan kekuatan yang melebar di antara negara-negara kawasan. Modernisasi militer yang berlangsung cepat, khususnya dalam dimensi angkatan laut dan teknologi rudal telah mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis. Negara-negara kecil dan menengah merasa kedaulatannya semakin terancam oleh kemampuan proyeksi kekuatan negara besar yang semakin agresif. Hal ini menciptakan rasa tidak aman yang mendalam, mendorong negara-negara tersebut untuk mencari payung keamanan baru atau memperkuat aliansi yang sudah ada guna menjamin kelangsungan hidup mereka.

Selain itu, efektivitas mekanisme keamanan regional yang ada saat ini dinilai belum memadai untuk meredam eskalasi ancaman-ancaman tersebut. Institusi multilateral yang selama ini menjadi penyangga stabilitas seringkali terkendala oleh prinsip konsensus yang lambat dan perbedaan kepentingan nasional

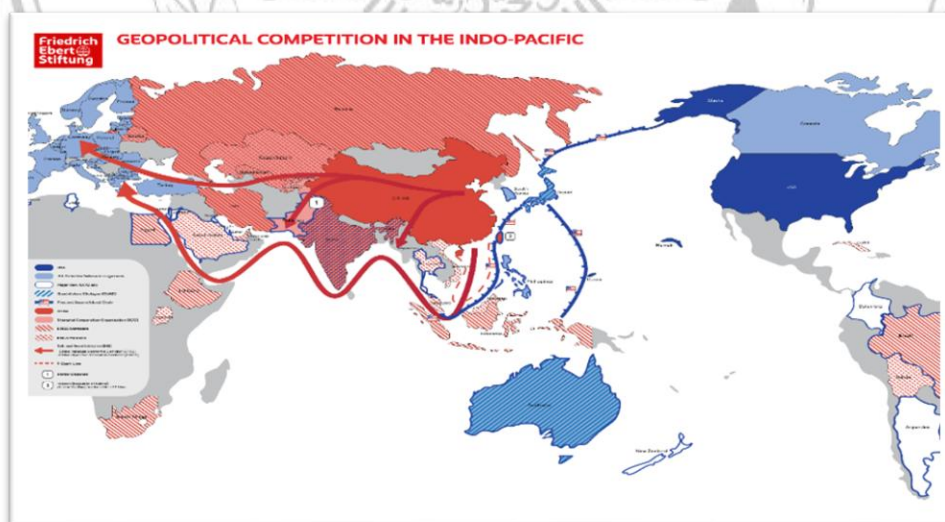
²⁷ Barry Buzan dan Ole Wæver, 2003, *Regions and Powers: The Structure of International Security*, Cambridge: Cambridge University Press, hal. 57.

yang tajam antaranggota. Kekosongan mekanisme penyelesaian konflik yang mengikat ini membiarkan sengketa-sengketa lama terus membara dan membuka celah bagi aktor-aktor negara untuk bertindak secara unilateral demi mengamankan kepentingan mereka sendiri, seringkali dengan mengabaikan hukum internasional yang berlaku.²⁸

Implikasi dari kompleksitas ancaman ini sangat dirasakan oleh negara-negara kepulauan dan negara pesisir di kawasan Asia Tenggara maupun Pasifik. Mereka berada di garis depan pertemuan arus ancaman, baik yang bersifat tradisional, maupun ancaman non-tradisional. Posisi geografis yang strategis menjadikan mereka objek perebutan pengaruh sekaligus korban pertama jika ketidakstabilan kawasan berubah menjadi konflik terbuka atau krisis kemanusiaan.

Gambar 2.1

Peta Kompetisi di Kawasan Indo-Pasifik



Sumber: *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 2025

²⁸ Amitav Acharya, 2001, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, London: Routledge, hal. 113-116.

Peta di atas memberikan gambaran terhadap kompleksitas ancaman keamanan di Indo-Pasifik sebagaimana diuraikan sebelumnya. Pembagian zona warna kontras antara blok merah dan biru merepresentasikan struktur polaritas ganda yang terbentuk akibat rivalitas strategis Amerika Serikat dan Tiongkok, sementara arah panah yang menunjuk masuk menuju Asia Tenggara mengilustrasikan fenomena penetrasi eksternal yang masif. Hal ini membuktikan secara visual bahwa keamanan kawasan sedang mengalami tekanan struktural dari dua arah yang berlawanan, sekaligus memperlihatkan posisi krusial negara-negara kepulauan yang berada tepat di garis depan pertemuan arus ancaman tersebut. Konfigurasi geografis ini menegaskan kerentanan negara-negara kawasan sebagai zona penyangga yang rentan terjepit menjadi objek perebutan pengaruh dalam dinamika persaingan kekuatan besar.

2.1.1.1. Ancaman Keamanan Tradisional

A. Sengketa Teritorial dan Militerisasi di Laut Cina Selatan

Persoalan utama dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah benturan antara klaim historis sepihak dengan hukum internasional yang berlaku. Tiongkok mengklaim hampir 90% wilayah perairan tersebut melalui peta *Nine-Dash Line*, yang secara langsung menabrak Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara pantai Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.²⁹ Klaim ini dianggap ilegal berdasarkan putusan Mahkamah Arbitrase Permanen tahun 2016, namun Beijing terus menolak putusan tersebut. Akibatnya, negara-

²⁹ M. Taylor Fravel, 2019, *Active Defense: China's Military Strategy since 1949*, Oxford: Princeton University Press, hal. 139.

negara kawasan kehilangan akses berdaulat terhadap sumber daya alam di wilayah mereka sendiri dan menghadapi ancaman terhadap integritas teritorial mereka.

Situasi semakin diperburuk oleh strategi *fait accompli* melalui militerisasi fitur-fitur maritim secara masif. Tiongkok telah mengubah terumbu karang menjadi pulau-pulau buatan yang berfungsi sebagai pangkalan militer depan, lengkap dengan landasan pacu, hanggar pesawat tempur, dan sistem rudal anti-kapal. Selain itu, penggunaan taktik Zona Abu-abu dengan mengerahkan pasukan Penjaga dan milisi maritim untuk mengintimidasi nelayan serta memblokir suplai logistik negara lain telah mengubah status quo secara fisik. Persoalan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko insiden taktis yang dapat memicu konflik terbuka sewaktu-waktu.³⁰

B. Kekuatan Angkatan Laut dan Perlombaan Senjata

Ancaman ini bersumber dari perubahan dalam distribusi kekuatan militer di kawasan, yang dipicu oleh modernisasi agresif Angkatan Laut Tiongkok (PLAN). Saat ini, PLAN telah berkembang menjadi angkatan laut terbesar di dunia secara kuantitas kapal, menggeser dominasi tradisional Amerika Serikat di Pasifik Barat. Kehadiran aset-aset strategis baru seperti kapal induk ketiga dan kapal perusak tipe 055 memberikan Tiongkok kemampuan proyeksi kekuatan jarak jauh yang belum pernah terjadi sebelumnya.³¹ Bagi negara-negara tetangga, lonjakan kapabilitas ini

³⁰ Charles Horner, Andrew S. Erickson, dan Ryan D. Martinson, *China's Maritime Gray Zone Operations*, *Naval War College Review*, Vol. 72, No. 4 (Autumn 2019), Article 15, Newport, RI: U.S. Naval War College.

³¹ Desmond Ball, 2021, *Asia's New Geopolitics: Military Power and Regional Order*, New York: Routledge, hal. 33.

bukan lagi dilihat sebagai pertahanan diri, melainkan sebagai ambisi ofensif untuk mendominasi jalur komunikasi laut vital.

Persoalan mendasar dari fenomena ini adalah terciptanya *security dilemma* yang memicu perlombaan senjata. Ketakutan akan hegemoni tunggal memaksa negara-negara lain untuk merespon dengan meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan. Misalnya Jepang, merevisi strategi keamanannya untuk memiliki kemampuan serangan balik, sementara Australia merasa armada kapal selam konvensional sudah usang sehingga beralih ke teknologi nuklir lewat AUKUS.³² Siklus aksi-reaksi ini menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai salah satu wilayah dengan akumulasi alutsista paling padat dan mematikan di dunia, di mana kesalahan perhitungan sedikit saja dapat berakibat fatal.

C. Konflik di Selat Taiwan

Selat Taiwan merepresentasikan ancaman keamanan tradisional yang berpotensi memicu perang skala besar antar-kekuatan besar. Persoalannya berakar pada tekad Beijing untuk melakukan penyatuan kembali dengan Taiwan, bahkan dengan kekuatan militer jika diperlukan, yang bertabrakan dengan komitmen Amerika Serikat untuk menjaga status quo di selat tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meningkatkan tekanan koersif secara drastis, menghapus garis tengah selat yang selama ini menjadi batas tidak resmi, serta melakukan

³² Christopher B. Johnstone, *Japan's Transformational National Security Strategy*, Centre for Strategic and International Studies, diakses dalam <https://www.csis.org/analysis/japans-transformational-national-security-strateg> (03/02/2026).

latihan militer pengepungan yang mensimulasikan blokade total terhadap pulau tersebut.³³

Eskalasi di Selat Taiwan bukan hanya masalah bilateral, melainkan ancaman sistemik bagi seluruh kawasan. Jika invasi militer terjadi, jalur perdagangan global yang melewati selat ini akan terputus, dan rantai pasok semikonduktor dunia akan hancur. Lebih jauh lagi, konflik ini hampir pasti akan menyeret keterlibatan militer Amerika Serikat dan sekutunya. Bagi negara-negara Asia Tenggara, skenario ini adalah mimpi buruk karena mereka akan terjebak di tengah medan tempur lintas negara.³⁴

Dimensi ancaman ini kian nyata setelah Presiden Xi Jinping memberikan legitimasi politik tertinggi dalam Kongres Partai Komunis Tiongkok ke-20. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa reunifikasi nasional merupakan syarat mutlak bagi tercapainya peremajaan besar bangsa Tiongkok. Poin krusialnya terletak pada penolakan Xi untuk menjamin ditinggalkannya opsi militer, ia secara spesifik menyatakan bahwa Tiongkok mencadangkan hak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna melawan intervensi asing dan elemen separatis.³⁵ Retorika ini mengirimkan sinyal strategis bahwa penggunaan kekuatan bersenjata di Selat Taiwan bukan lagi sekadar tabu, melainkan instrumen kebijakan yang sah dan siap diaktifkan apabila status quo berubah.

D. Proliferasi Nuklir dan Rudal Balistik di Semenanjung Korea

³³ China Power Team, *Tracking the Fourth Taiwan Strait Crisis*, diakses dalam <https://chinapower.csis.org/tracking-the-fourth-taiwan-strait-crisis/> (03/02/2026).

³⁴ Brendan Taylor, *Dangerous Decade: Taiwan's Security and Crisis Management*, (2019), diakses dalam <https://www.iiss.org/publications/adelphi/2019/dangerous-decade/> (05/01/2026).

³⁵ Raigirdas Boruta, *20th National Congress of the CPC*, 2022, Vilnius: Eastern Europe Studies Center (EESC).

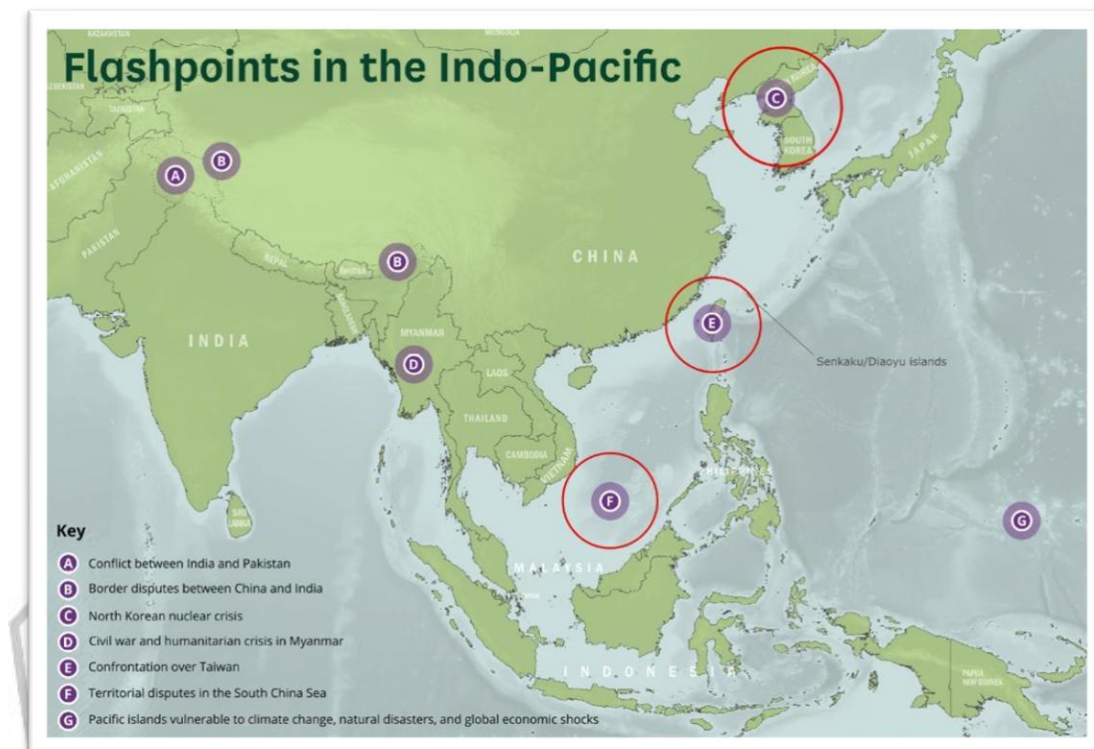
Di Laut Asia Timur, ancaman tradisional bersumber dari program senjata pemusnah massal Korea Utara yang terus berkembang tanpa kendali. Persoalan utamanya adalah kemampuan Pyongyang yang kini tidak hanya mengancam tetangga terdekatnya, tetapi juga memiliki kapabilitas serangan antarbenua yang dapat menjangkau daratan Amerika Serikat. Uji coba rudal yang provokatif dan retorika penggunaan senjata nuklir taktis telah mendestabilisasi kondisi keamanan regional secara fundamental.³⁶

Kondisi ini menciptakan efek domino yang berbahaya bagi negara-negara di sekitarnya. Ancaman nuklir Korea Utara menjadi justifikasi utama bagi Korea Selatan dan Jepang untuk mempererat aliansi militer trilateral dengan Amerika Serikat, serta memicu perdebatan internal di kedua negara tersebut mengenai perlunya memiliki penangkal nuklir sendiri di masa depan. Ketegangan yang persisten ini menambah lapisan kompleksitas keamanan di Indo-Pasifik, menjadikan kawasan ini sandera dari potensi perang nuklir yang dapat meletus akibat kesalahan persepsi atau kegagalan diplomasi.³⁷

³⁶ Hans M. Kristensen and Matt Korda, *North Korean Nuclear Weapons*, Bulletin of the Atomic Scientists, Vol, 78, No, 5, 2022, Inggris Raya: Taylor & Francis Group.

³⁷ Joel S. Wit dan Sun Young Ahn, 2015, *North Korea's Nuclear Futures: Technology and Strategy*, *North Korea's Nuclear Futures Series*, Washington, DC: US-Korea Institute at SAIS, hal. 17.

Gambar 2.2
Peta Titik Api Utama di Kawasan Indo-Pasifik



Sumber: *House of Commons Defence Committee, 2023*

2.1.1.2. Ancaman Keamanan Non-Tradisional

A. Kejahatan Maritim Transnasional dan IUU Fishing

Masifnya praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur adalah kejahatan maritim di kawasan ini. Kekayaan laut Indo-Pasifik telah menjadikannya target eksploitasi berlebihan yang mengancam ketahanan pangan jutaan orang. Masalah ini bukan sekadar pencurian ikan biasa, melainkan telah berevolusi menjadi kejahatan terorganisir yang kompleks. Kapal-kapal ikan asing sering kali beroperasi dengan mematikan sistem pelacak dan menggunakan alat tangkap merusak, yang mengakibatkan kerugian ekonomi miliaran dolar per tahun bagi negara-negara pantai, khususnya di Asia Tenggara dan Pasifik.

Namun, persoalan yang lebih mendalam adalah politisasi dari aktivitas penangkapan ikan ini. Di Laut Cina Selatan dan Natuna Utara, praktik *IUU Fishing* sering kali bercampur dengan strategi negara. Kapal-kapal nelayan asing kerap dikawal oleh pasukan Penjaga Pantai atau merupakan bagian dari milisi maritim yang bertugas menegaskan klaim wilayah secara *de facto*.³⁸ Hal ini mengaburkan batas antara kejahatan kriminal dan agresi kedaulatan, membuat penegakan hukum menjadi sangat berisiko karena dapat memicu insiden diplomatik atau bentrokan fisik antar-aparat negara.

B. Perubahan Iklim

Bagi kawasan Pasifik, perubahan iklim bukanlah isu lingkungan semata, melainkan ancaman keamanan eksistensial yang paling mendesak. Persoalan utamanya adalah kenaikan permukaan air laut yang mengancam keberlangsungan fisik negara-negara kepulauan atol seperti Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall.³⁹ Jika tren pemanasan global berlanjut, negara-negara ini menghadapi risiko tenggelam total, yang akan memicu krisis kemanusiaan berupa gelombang pengungsi iklim yang tidak memiliki status hukum jelas dalam hukum internasional saat ini.

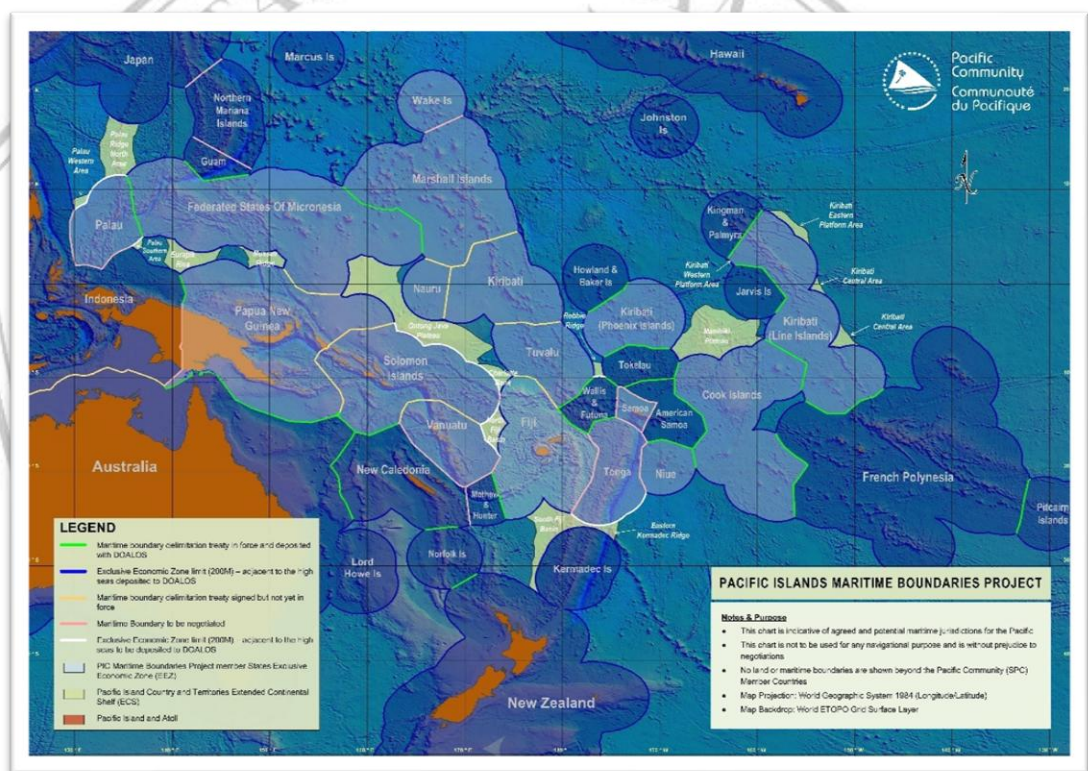
Selain ancaman fisik terhadap daratan, perubahan iklim juga membawa implikasi hukum dan geopolitik yang serius. Tenggelamnya pulau-pulau terluar dapat mengubah titik dasar pengukuran batas wilayah laut. Hal ini berpotensi

³⁸ Zhang Hongzhou, *China's Evolving Fishing Industry: Implications for Regional and Global Maritime Security*, RSIS (Rajaratnam School of International Studies), Working Paper, Agustus 2012, Rajaratnam School of International Studies.

³⁹ Destin Novitasari et al., *Maritime Security Strategy in the Indo-Pacific Region from the Perspective of Geopolitics and International Law*, *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, Vol, 48, No. 2 (Jakarta 2025), hal. 5.

menyusutkan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara tersebut secara drastis, menghilangkan hak berdaulat mereka atas sumber daya laut yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ketidakpastian ini menciptakan kerentanan strategis baru, di mana negara-negara Pasifik merasa prioritas keamanan mereka diabaikan oleh kekuatan besar yang lebih sibuk memperdebatkan kapal selam nuklir daripada menahan laju emisi karbon.

Gambar 2.3
Peta Yurisdiksi Maritim dan Negara Kepulauan Pasifik



Sumber: The Pacific Community, 2020

Visualisasi zona ZEE yang masif pada peta di atas menjelaskan mengapa kawasan ini menjadi target operasi perikanan ilegal yang sangat sulit dideteksi. Kesulitan ini bukan hanya karena luasnya samudra, melainkan akibat modus operandi kapal asing yang mematikan *Automatic Identification System* (AIS) atau

dikenal sebagai *dark vessels* untuk menghilang dari pantauan satelit saat memasuki perairan berdaulat negara lain.⁴⁰ Laporan dari *Forum Fisheries Agency* (FFA) mencatat bahwa praktik ilegal ini mengakibatkan kerugian ekonomi langsung bagi negara-negara Pasifik sebesar US\$ 616 juta per tahun, atau setara dengan kerugian ribuan ton stok tuna yang menjadi komoditas vital kawasan.⁴¹

Selain kerugian ekonomi, peta yurisdiksi tersebut juga memperlihatkan kerentanan kedaulatan akibat krisis iklim. Negara-negara kepulauan atol seperti Tuvalu dan Kiribati yang memiliki rata-rata ketinggian tanah kurang dari dua meter di atas permukaan laut, menghadapi ancaman penyusutan garis pangkal (*baselines*) akibat naiknya permukaan air laut. Berdasarkan hukum laut internasional, mundurnya garis pangkal ini berpotensi menghilangkan ribuan kilometer persegi klaim ZEE yang sah secara hukum.⁴² Hal ini menjadi ancaman eksistensial, mengingat data Bank Dunia menunjukkan bahwa bagi negara seperti Tuvalu dan Kepulauan Marshall, pendapatan dari lisensi perikanan di zona maritim tersebut menyumbang hingga 75% dari total pendapatan pemerintah mereka, yang kini terancam hilang jika batas negara tersebut tenggelam.⁴³

C. Keamanan Siber dan Perang Hibrida

⁴⁰ Elizabeth M. J. Lee & Kathleen G. O'Malley, *Big Fishery, Big Data, and Little Crabs: Using Genomic Methods to Examine the Seasonal Recruitment Patterns of Early Life Stage Dungeness Crab (*Cancer magister*) in the California Current Ecosystem*, *Frontiers in Marine Science*, Vol, 6, No, 836, (2020), Lausanne: Frontiers Media SA, hal. 5.

⁴¹ Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA), *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: 2020 Update*, 2020, Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA).

⁴² David Freestone and Clive Schofield, *Sea Level Rise and Archipelagic States: A Preliminary Legal Assessment*, *Ocean Development & International Law*, Vol, 42, No, 1-2, London: Routledge (Taylor & Francis Group), hal. 7.

⁴³ World Bank, *Pacific Possible: Tuna Fisheries*, World Bank Working Paper, (2017), Washington, DC: World Bank, hal. 43.

Konektivitas digital yang masif di Indo-Pasifik telah mengubah kawasan ini menjadi teater utama pertempuran siber, dengan eskalasi serangan yang menargetkan infrastruktur vital. Persoalan ini bukan lagi sekadar potensi risiko, melainkan ancaman aktif yang terukur. Laporan dari *Microsoft Digital Defense Report* pada 2023 mencatat bahwa kawasan Asia-Pasifik menerima porsi serangan siber terbesar kedua di dunia, dengan aktor yang disponsori negara menargetkan sektor energi, transportasi, dan pemerintahan.⁴⁴ Contoh nyata kerentanan ini terlihat pada kasus *Volt Typhoon*, sebuah operasi siber yang menurut badan intelijen "Five Eyes" telah berhasil menyusup ke dalam jaringan infrastruktur kritis di Guam dan pangkalan militer Amerika Serikat di Pasifik yang dirancang untuk melumpuhkan sistem komunikasi saat konflik fisik pecah.⁴⁵

Selain serangan terhadap infrastruktur, ancaman ini telah bermetamorfosis menjadi perang kognitif yang menggunakan disinformasi sebagai senjata strategis. Taiwan menjadi contoh empiris paling jelas dari fenomena ini. Data pemerintah Taiwan mengungkapkan bahwa pulau tersebut menghadapi rata-rata 5 juta serangan siber dan upaya intrusi setiap hari yang sering kali dibarengi dengan operasi pengaruh terkoordinasi.⁴⁶ Modus operandinya melibatkan penggunaan pabrik konten dan akun palsu berbasis AI untuk membanjiri media sosial dengan narasi yang memecah belah kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dalam konteks ASEAN, taktik serupa juga terdeteksi dalam bentuk manipulasi opini

⁴⁴ Microsoft Digital, *Microsoft Digital Defense Report*, 2023, Washington, DC: Microsoft Office

⁴⁵ National Security Agency (NSA), *People's Republic of China (PRC) State-Sponsored Cyber Actor Living off the Land to Evade Detection*, 2023, Washington, DC : Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).

⁴⁶ Franklin D. Kramer Philip Yu, Joseph Webster, and Elizabeth Sizeland, 2024, *Toward resilience: An action plan for Taiwan in the face of PRC aggression*, Washington, D.C: Atlantic Council

publik terkait sengketa Laut Cina Selatan yang bertujuan melemahkan kohesi diplomatik kawasan tanpa perlu meletuskan satu peluru pun.⁴⁷

2.1.2. Pengaruh AUKUS terhadap Keamanan di Kawasan dan Indonesia

Pembentukan AUKUS pada September 2021 hadir sebagai kejutan yang mengguncang tatanan keamanan kawasan Indo-Pasifik yang selama ini relatif stabil. Dalam kacamata *Regional Security Complex Theory* (RSC), kehadiran aliansi ini merepresentasikan bentuk penetrasi eksternal yang masif, di mana kekuatan besar dari luar kawasan secara langsung mengintervensi dinamika keamanan lokal. Hal ini mengakibatkan hilangnya otonomi relatif kawasan Indo-Pasifik, karena agenda keamanan regional kini ditentukan oleh persaingan global, menggeser struktur keamanan yang sebelumnya berpusat pada dinamika internal negara-negara kawasan.

Dari perspektif strategis global, AUKUS menegaskan pergeseran prinsip Amerika Serikat dan sekutu tradisionalnya dari pendekatan pelibatan diplomatik menuju strategi penyeimbangan keras terhadap kebangkitan Tiongkok.⁴⁸ Keputusan untuk mempersenjatai Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir menunjukkan bahwa blok Barat kini memprioritaskan kemampuan penangkalan jarak jauh dan letalitas militer di atas pertimbangan stabilitas diplomatik jangka pendek. Langkah ini secara langsung mengubah kekuatan di lapangan, menempatkan aset militer

⁴⁷ Fisheries Information and Monitoring Initiative (FIMI), *Fisheries Information and Monitoring Initiative (FIMI): Research Report*, 2019, Jakarta: Fisheries Information and Monitoring Initiative (FIMI)

⁴⁸ The International Institute for Strategic Studies (IISS), 2022, *Asia-Pacific Regional Security Assessment 2022: Key Developments and Trends* (ed.9), London: The International Institute for Strategic Studies, hal. 12.

Barat dengan kapabilitas senyap tepat di halaman depan wilayah yang menjadi pusat perebutan pengaruh.

Perubahan postur militer ini lantas memicu reaksi berantai yang memperdalam defisit kepercayaan di antara kekuatan-kekuatan besar secara drastis. Tiongkok memaknai pembentukan pakta trilateral ini sebagai upaya pengepungan sistematis oleh kekuatan Barat, yang secara otomatis memicu insting pertahanan agresif dari Beijing untuk mengamankan klaim teritorialnya. Akibatnya, kawasan Indo-Pasifik terperangkap dalam *zero-sum game*, di mana peningkatan keamanan satu pihak dianggap sebagai ancaman langsung bagi pihak lain. Dinamika ini menciptakan atmosfer ketegangan yang persisten, meningkatkan risiko eskalasi konflik dari sekadar persaingan ekonomi menjadi potensi konfrontasi militer terbuka.⁴⁹

Bagi negara-negara kawasan, khususnya negara-negara anggota ASEAN, transformasi struktural ini menghadirkan tekanan berat. Teori RSC menjelaskan bahwa negara-negara di Asia Tenggara berada dalam posisi Insulator, yaitu wilayah penyangga yang terjepit di antara dua kompleks keamanan besar. Tatanan yang semakin terpecah mempersempit ruang gerak diplomasi bagi negara Insulator ini. Negara-negara kawasan kini dihadapkan pada realitas bahwa wilayah mereka telah berubah menjadi arena kontestasi, memaksa mereka meninjau ulang strategi pertahanan di tengah tarikan dua raksasa geopolitik.

⁴⁹ The International Institute for Strategic Studies (IISS), 2023, *Asia-Pacific Regional Security Assessment 2023: Key Developments and Trends* (ed.10), London: The International Institute for Strategic Studies, hal. 32.

Lebih jauh lagi, guncangan yang ditimbulkan oleh AUKUS bersifat multidimensi, beralih dari aspek militer hingga ke tatanan normatif dan institusional yang telah lama stabil. Kompleksitas pengaruh ini tidak bisa dilihat secara tunggal, melainkan merupakan pengumpulan dari berbagai pergeseran variabel keamanan yang saling berkaitan dan berpotensi mendestabilisasi kawasan dalam jangka panjang.

2.1.2.1. Pergeseran *Balance of Power*

Kehadiran AUKUS secara fundamental mengubah distribusi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik yang sebelumnya bersifat fleksibel menjadi konfigurasi dua blok kekuatan yang semakin mengeras.⁵⁰ Selama beberapa dekade terakhir, kawasan ini ditandai oleh tatanan yang kompleks di mana Amerika Serikat memegang supremasi militer melalui jaringan aliansi *Hub and Spokes*, sementara Tiongkok mendominasi gravitasi ekonomi regional. Namun, AUKUS merusak keseimbangan delikasi ini dengan menambahkan kapabilitas militer strategis baru secara masif ke kubu sekutu AS. Dengan memberikan akses teknologi kapal selam nuklir kepada Australia, blok Barat secara efektif menciptakan kekuatan baru di selatan Indo-Pasifik yang dirancang khusus untuk menandingi ekspansi maritim dan dominasi Angkatan Laut Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik.⁵¹

Transformasi ini memaksa tatanan kawasan bergerak menjauh dari tatanan multi-aktor kekuatan langsung dua blok besar. Sebelumnya, banyak negara di

⁵⁰ Alifsar Nurfauzi, Frisca Lampita, dan Muhammad Rizky Mahendra, *The Impact of AUKUS in Indonesian Perspective: Regional Military Balance and Security Dilemma*, SENTRIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 3, No, 2 (Sumedang 2022), hal. 21.

⁵¹ The International Institute for Strategic Studies (IISS), 2022, *The Military Balance 2022*, London: The International Institute for Strategic Studies, hal. 11.

kawasan dapat menikmati keuntungan dari kedua belah pihak keamanan dari AS dan kemakmuran ekonomi dari Tiongkok tanpa harus memilih pihak secara tegas. Namun, pengerasan aliansi militer Barat melalui AUKUS memaksa Tiongkok untuk merespon dengan penguatan kekuatan yang sama kerasnya, sehingga menciptakan garis pemisah ideologis dan strategis yang semakin jelas. Kondisi ini mirip dengan pola Perang Dingin, di mana setiap interaksi negara-negara di kawasan kini selalu diukur berdasarkan kedekatannya dengan poros Washington atau poros Beijing, menghilangkan ruang aman yang selama ini menjadi zona nyaman diplomasi ASEAN.

Implikasi lebih lanjut dari bipolaritas keras ini adalah menyempitnya otonomi strategis bagi negara-negara menengah dan negara kecil. Dalam sistem yang sangat terpolarisasi, negara-negara seperti Indonesia dan anggota ASEAN lainnya menghadapi tekanan diplomatik yang semakin intensif untuk memihak. Tarikan dari kedua kubu membuat kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif menjadi semakin sulit untuk dijalankan tanpa risiko alienasi dari salah satu pihak. Keseimbangan kekuatan yang baru ini tidak lagi didasarkan pada konsensus atau norma bersama, melainkan pada kalkulasi material militer yang menempatkan negara-negara non-aliansi dalam posisi rentan sebagai objek perebutan pengaruh atau medan proksi potensial.

2.1.2.2. Eskalasi Dilema Keamanan dan Perlombaan Senjata

Dalam perspektif realisme dan RSC, pembentukan AUKUS telah mengubah pola pertemanan dan permusuhan di kawasan secara drastis. Tiongkok memandang akuisisi kapal selam nuklir Australia sebagai sinyal permusuhan yang bersifat

eksistensial, bukan sekadar modernisasi alutsista. Beijing menafsirkan kemampuan kapal selam nuklir yang memiliki daya jelajah jauh dan tingkat kesenyapan tinggi sebagai aset berbasis proyeksi kekuatan yang berpotensi mengganggu jalur suplai energi dan perdagangan Tiongkok di selat-selat strategis. Persepsi ancaman yang meninggi ini memicu dilema keamanan klasik, di mana upaya satu pihak untuk merasa aman justru membuat pihak lain merasa sangat tidak aman.⁵²

Persepsi ancaman tersebut secara langsung mendorong Tiongkok untuk mengambil langkah balasan yang dianggap proporsional, sehingga memicu pola eskalasi berjenjang yang berbahaya. Sebagai respon rasional terhadap AUKUS, Tiongkok terdorong untuk mengintensifkan program modernisasi militernya.⁵³ Fokus pengembangan militer Tiongkok bergeser pada peningkatan kemampuan anti-kapal selam, perluasan jaringan sensor bawah air, serta pengembangan rudal balistik dan hipersonik. Reaksi ini bukan hanya retorika, melainkan tercermin dalam peningkatan anggaran pertahanan dan frekuensi latihan militer di perairan sengketa, yang pada gilirannya kembali meningkatkan rasa tidak aman bagi negara-negara tetangga lainnya.

Efek domino dari dilema keamanan ini melahirkan perlombaan senjata regional yang tidak terelakkan di seluruh kompleks keamanan Indo-Pasifik. Ketidakstabilan yang dipicu oleh rivalitas AS-Tiongkok dan Australia akan mendorong negara-negara lain di Asia Tenggara dan Asia Timur untuk turut

⁵² The International Institute for Strategic Studies (IISS), 2023, *Asia-Pacific Regional Security Assessment 2023: Key Developments and Trends* (ed.10), London: The International Institute for Strategic Studies, hal. 34.

⁵³ United States Department of Defense, 2025, *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China*, Washington, D.C.: Department of Defense hal. 29-35.

memperkuat kapabilitas pertahanan mereka sendiri. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Filipina, mulai meningkatkan belanja militer dan mencari kemitraan strategis baru untuk mengantisipasi ketidakpastian kawasan. Akumulasi senjata canggih di satu kawasan geografis yang padat sengketa wilayah ini secara drastis meningkatkan risiko konflik terbuka akibat kesalahan perhitungan atau insiden tak disengaja di laut.

2.1.2.3. Pelemahan Non-Proliferasi Nuklir dan Ancaman bagi Zona Bebas

Nuklir

Dampak AUKUS juga merambah secara merusak secara normatif terhadap tatanan normatif global, khususnya yang berkaitan dengan rezim non-proliferasi nuklir. Meskipun Amerika Serikat, Inggris, dan Australia bersikeras bahwa kerja sama ini mematuhi hukum internasional, keputusan untuk mentransfer teknologi propulsi nuklir yang menggunakan *Highly Enriched Uranium* tingkat senjata kepada negara non-senjata nuklir menciptakan preseden yang sangat berbahaya. Langkah ini mengeksploitasi celah hukum dalam Perjanjian Non-Proliferasi yang memperbolehkan negara non-nuklir untuk mengeluarkan bahan fisil dari pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) jika digunakan untuk keperluan militer non-eksplosif, seperti bahan bakar kapal selam.⁵⁴ Preseden ini secara efektif melemahkan semangat pengendalian senjata nuklir yang telah dibangun selama berpuluh-puluh tahun.

⁵⁴ Trevor Findlay, *The Australia-UK-U.S. Submarine Deal: Mitigating Proliferation Concerns*, *Arms Control Today*, Vol, 51, No, 9, (Washington, DC 2022), Washington, DC: Arms Control Association, hal. 8-16 (2022).

Kekhawatiran utama dari komunitas internasional adalah potensi efek yang ditimbulkan oleh kesepakatan ini. Jika Australia diperbolehkan memanfaatkan celah tersebut, maka tidak ada alasan legal yang kuat untuk melarang negara lain yang memiliki ambisi nuklir seperti Iran, Korea Utara, atau bahkan negara lain di masa depan untuk melakukan hal yang sama dengan dalih kepentingan propulsi kapal laut. Standar ganda ini mengikis kredibilitas negara-negara Barat sebagai penjaga norma non-proliferasi dan mempersulit upaya global untuk mencegah penyebaran teknologi sensitif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu proliferasi nuklir, di mana banyak negara memiliki bahan nuklir tingkat senjata di bawah program militer mereka tanpa pengawasan internasional yang memadai.

Bagi kawasan Asia Tenggara, kehadiran kapal selam bertenaga nuklir merupakan tantangan langsung terhadap *Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau Traktat Bangkok. ASEAN telah lama bercita-cita menjadikan kawasannya bebas dari segala bentuk aktivitas nuklir militer demi menjaga perdamaian. Meskipun AUKUS berjanji tidak akan membawa kepala nuklir, operasionalisasi kapal selam bertenaga nuklir yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan perairan regional lainnya tetap membawa risiko radiologis dan kecurigaan strategis. Kehadiran aset-aset tersebut menyulitkan pembedaan antara zona bebas senjata nuklir dan wilayah operasi platform nuklir, sehingga melemahkan integritas

normatif ASEAN dan menimbulkan rasa ketidakamanan psikologis di kalangan masyarakat kawasan.⁵⁵

2.1.2.4. Pelemahan Sentralitas ASEAN akibat Minilateralisme

Sebelum kemunculan pakta pertahanan eksklusif seperti AUKUS, ASEAN memegang mandat empiris sebagai satu-satunya wadah yang efektif dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Keberhasilan manajerial ini dibuktikan secara historis melalui penyelesaian Konflik Kamboja (1991), di mana ASEAN berhasil memfasilitasi perdamaian di kawasan yang sebelumnya terkoyak perang dingin.⁵⁶ Lebih jauh lagi, kekuatan diplomasi ASEAN terukur dari kemampuannya mengikat perilaku agresif negara-negara adidaya ke dalam kerangka normatif Treaty of Amity and Cooperation. Data menunjukkan bahwa ASEAN sukses memaksa seluruh Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB (P5) untuk meratifikasi traktat non-agresi tersebut dimulai oleh Tiongkok pada tahun 2003 dan diikuti oleh Amerika Serikat pada 2009.⁵⁷ Melalui wadah *ASEAN Regional Forum* yang beranggotakan 27 negara, ASEAN berfungsi sebagai satu-satunya inkubator kepercayaan yang mampu mendudukkan rival strategis seperti Korea Utara, Amerika Serikat, dan Tiongkok dalam satu meja perundingan, sebuah prestasi diplomatik yang belum dapat ditandingi oleh organisasi regional manapun di dunia.⁵⁸

⁵⁵ Andrew Mantong, Waffa Kharisma, 2022, *Navigating Uncharted Waters: Security Cooperation Between ROK and ASEAN*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), hal. 151.

⁵⁶ Sothirak Pou, Bradley Murg, Charadine Pich, and Courtney Weatherby, *The Paris Peace Agreements Looking Back And Moving Forward*, 2021, Washington DC: Stimson.

⁵⁷ ASEAN, *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: Status of Accession*, ASEAN Secretariat Information Paper, (2023), Jakarta: ASEAN Secretariat.

⁵⁸ Alice D. Ba, 2009, *[Re]Negotiating East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations*, Stanford: Stanford University Press, hal. 160-165.

Namun secara institusional, kemunculan AUKUS memberikan pukulan bagi relevansi wadah manajerial tersebut. Pembentukan aliansi ini menandai pergeseran paradigma keamanan dari multilateralisme inklusif versi ASEAN menuju minilateralisme eksklusif yang dipimpin Barat. Fenomena ini membuktikan bahwa kekuatan-kekuatan besar tidak lagi mempercayai mekanisme internal ASEAN sebagai sarana efektif untuk mencapai tujuan keamanan strategis mereka.⁵⁹ Absennya konsultasi dengan ASEAN sebelum pengumuman AUKUS menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap *ASEAN Way* telah tergerus oleh kalkulasi *realpolitik* yang lebih agresif.

Implikasi jangka panjang dari pelemahan ini adalah kehilangan ASEAN dalam pengambilan keputusan strategis. Keputusan-keputusan paling krusial yang menyangkut arah keamanan kawasan kini diambil di luar struktur ASEAN yakni di Washington, London, dan Canberra tanpa melibatkan Jakarta, Kuala Lumpur, atau Singapura. Akibatnya, ASEAN berisiko tereduksi hanya menjadi forum diplomatik prosedural yang membahas isu-isu lunak, sementara isu pertahanan keras dan perimbangan kekuatan dikelola sepenuhnya oleh aliansi eksternal yang melakukan penetrasi ke dalam kompleks keamanan regional. Situasi ini mengancam relevansi ASEAN sebagai penjamin stabilitas utama di kawasannya sendiri.⁶⁰

⁵⁹ William Choong dan Ian Storey, *Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, NonProliferation and Regional Stability*, ISEAS Perspective No, 134, (Singapore 2022), Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute, hal. 10.

⁶⁰ Richard Maude, *Australia's AUKUS Gambit*, 2021, diakses dalam <https://asiasociety.org/australia/australias-aukus-gambit> (03/02/2026).

2.1.2.5.Sentralisasi Ancaman terhadap Indonesia

Selain berdampak pada stabilitas regional, pengaruh AUKUS secara spesifik mengarah pada ancaman yang bersifat eksistensial bagi wilayah kedaulatan Indonesia. Secara geografis, posisi Indonesia berada tepat di tengah lintasan antara pangkalan militer Australia di selatan dan titik panas konflik di Laut Cina Selatan maupun Asia Timur di utara. Konfigurasi spasial ini menjadikan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai urat nadi logistik sekaligus jalan militer yang tak terhindarkan bagi mobilitas armada kapal selam bertenaga nuklir (SSN) milik aliansi AUKUS dalam memproyeksikan kekuatannya.

Ketergantungan operasional AUKUS pada ALKI ini menghadirkan kerentanan yang fatal bagi keamanan nasional Indonesia. Ancaman ini tidak sekadar terbatas pada dimensi militer tradisional seperti meningkatnya potensi spionase bawah air atau pelanggaran hak lintas damai, melainkan secara langsung mencakup ancaman ekologis dan keselamatan navigasi laut yang sangat nyata. Dengan beroperasinya kapal selam yang membawa reaktor bertenaga *Highly Enriched Uranium* (HEU) di perairan sempit dan padat lalu lintas kelautan, risiko terjadinya salah kalkulasi, tabrakan armada bawah laut dengan kapal lain, hingga insiden kebocoran reaktor nuklir di wilayah perairan kepulauan maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia meningkat secara drastis.⁶¹

Jika insiden atau kegagalan sistem reaktor tersebut terjadi, Indonesia akan menjadi pihak pertama yang menanggung bencana ekologis berskala masif.

⁶¹ Ahmad Fikri dkk., *Nuclear Threat in Indonesia's Sovereign Rights Impacted by the AUKUS Agreement*, *Srivijaya Crimen and Legal Studies*, Vol, 2, No, 2 (Banten 2024), hal. 104.

Pencemaran radiasi radioaktif di perairan kedaulatan tidak hanya akan menghancurkan keanekaragaman hayati laut secara permanen, tetapi juga melumpuhkan secara total sektor perikanan tangkap dan pariwisata maritim yang menjadi urat nadi ekonomi jutaan masyarakat pesisir Indonesia.

Situasi ini menjadi semakin kritis karena kapal perang dan kapal selam militer negara asing dilindungi oleh prinsip kekebalan kedaulatan dalam hukum laut internasional. Celah hukum dan absennya regulasi ganti rugi nuklir militer yang mengikat membuka ruang bagi negara-negara anggota AUKUS untuk melepaskan diri dari tanggung jawab mutlak terhadap kompensasi kerugian ekologis dan ekonomi yang diderita oleh negara pantai. Oleh karena itu, bagi Indonesia, kemunculan AUKUS bukan sekadar isu geopolitik perimbangan kekuatan jarak jauh, melainkan sebuah ancaman langsung yang mematikan bagi jantung kedaulatan dan kelestarian ekosistem maritim nusantara.

2.1.3. Prinsip Global Britain sebagai Strategi Inggris di Kawasan Indo-Pasifik

Pasca-keputusan politik historis untuk keluar dari Uni Eropa pada tahun 2020, Inggris menghadapi tantangan struktural berupa penurunan pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan di daratan Eropa. Sehingga guna mengantisipasi potensi isolasi strategis tersebut, London meluncurkan prinsip politik luar negeri baru yang ambisius yang dikenal sebagai *Global Britain*. Prinsip ini menekankan orientasi ulang kebijakan internasional Inggris untuk kembali bertransformasi menjadi aktor geopolitik yang aktif, berwawasan luas, dan mampu memproyeksikan kekuatan militernya jauh melampaui batas tradisional benua Eropa. Di bawah kerangka tinjauan strategis terintegrasi, Inggris secara resmi

menetapkan kebijakan pergeseran strategis ke arah timur atau *Indo-Pacific Tilt*. Kawasan Indo-Pasifik dipilih karena posisinya sebagai pusat gravitasi ekonomi dan geopolitik baru dunia, sehingga keterlibatan aktif Inggris di kawasan ini dipandang sebagai prasyarat mutlak untuk menunjukkan eksistensi militer global mereka di abad ke-21.⁶²

Keterlibatan Inggris dalam kemitraan minilateral eksklusif AUKUS bukan sekadar bentuk solidaritas kultural sesama blok, melainkan didorong oleh motif pragmatis ekonomi-politik yang kuat, khususnya revitalisasi basis industri pertahanan domestik. Melalui pilar pertama AUKUS, Inggris berhasil mengamankan kontrak desain dan produksi jangka panjang untuk pengembangan armada kapal selam masa depan (SSN-AUKUS) yang mengintegrasikan teknologi reaktor nuklir sensitif mereka. Keberhasilan ini secara langsung menyuntikkan modal besar dan menghidupkan kembali rantai pasok industri maritim militer Inggris yang sempat mengalami stagnasi.

Namun secara strategis, keterbatasan kapabilitas finansial dan jangkauan armada mandiri pasca-Brexit membuat Inggris tidak mampu melakukan operasi militer secara berkelanjutan di perairan Asia yang terpisah oleh jarak yang ekstrem. Oleh karena itu, Inggris menerapkan strategi proyeksi kekuatan pada jaringan hegemoni Amerika Serikat serta memanfaatkan pangkalan pertahanan strategis milik Australia. Pakta pertahanan trilateral ini menjadi instrumen taktis bagi London untuk menumpang jalur pada pengaruh militer AS guna membendung

⁶² HM Government, *Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy* (London: Cabinet Office, 2021), hlm. 14-15.

pengaruh maritim Tiongkok, sekaligus melegitimasi kembalinya pengaruh pertahanan Inggris secara fisik di halaman depan kawasan Indo-Pasifik tanpa harus menanggung beban biaya operasional *unipolar* secara penuh.⁶³



⁶³ House of Commons Defence Committee, *UK Defence and the Indo-Pacific*, Eleventh Report of Session 2022–23 (London: House of Commons, Oktober 2023), hlm. 22-25.